

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi fokus utama pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dalam pembangunan kesehatan dan sumber daya manusia. Stunting di definisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama, terutama pada priode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan fase paling krusial dalam menentukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak. Permasalahan stunting menjadi sangat krusial karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Stunting tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak yang terhambat, tetapi juga pengaruh terhadap perkembangan kognitif, produktifitas, serta daya saing bangsa dalam jangka panjang baik dalam aspek fisik maupun mental. Oleh karena itu, stunting dipandang sebagai persoalan multidimensional yang berkaitan erat dengan aspek kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Upaya penanggulangan stunting telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program lintas sektor, mulai dari intervensi spesifik di bidang kesehatan hingga intervensi sensitif yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah

Indonesia telah menetapkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan berbagai regulasi dan kebijakan seperti Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Perpes ini mendasari bagaimana upaya yang dilakukan melalui Strategi Nasional (Stranas) yang menegaskan bahwa penanggulangan stunting harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, konvergen, dengan melibatkan lintas sektor yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Kebijakan ini diperkuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kebijakan teknis di bidang kesehatan yang dilaksanakan melalui Puskesmas, Posyandu, dan berbagai perangkat di desa.

Sebagai upaya penurunan stunting, Pemerintah menghadapi tantangan dalam menurunkan angka stunting yang cukup tinggi. Untuk menanggulangi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan berbagai kebijakan termasuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan dan Penanggulangan Stunting. Perbup ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu pemerintah juga mengimplementasikan beberapa program terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada penanganan balita stunting tetapi juga pada pencegahan melalui perbaikan gizi seperti Program Gizi Nasional, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Kesehatan Ibu dan Anak, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih di masyarakat. Program - program tersebut berperan penting dalam penurunan stunting. Semua ini adalah bagian dari upaya komprehensif yang mencakup sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Program Gizi Nasional, yang difokuskan pada peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita, bertujuan untuk memastikan ibu dan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sementara itu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) memberikan dukungan berupa makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita guna mencegah kekurangan gizi yang bisa berujung pada stunting. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pola makan sehat di kalangan ibu hamil dan ibu menyusui. Di samping itu, program Kesehatan Ibu dan Anak mengarah pada penguatan layanan kesehatan yang komprehensif, yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, kelahiran yang aman, serta pemantauan perkembangan anak di usia dini. Semua program ini diharapkan dapat memberikan solusi preventif terhadap masalah stunting yang terjadi di masyarakat.

Secara Nasional, stunting di Indonesia memang menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah meskipun berbagai kebijakan dan program telah dirancang dan dilaksanakan. Beberapa daerah tertentu masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pelaksana kebijakan, sumber daya, maupun lemahnya koordinasi antar pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada proses implementasi di lapangan sesuai dengan kondisi lokal, sehingga membutuhkan pendekatan yang adaptif dan kontekstual.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang besar turut menjadi bagian dari percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah bersama Puskesmas Kecamatan dan desa telah melaksanakan berbagai program penanggulangan stunting. Desa Ciburial sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Bandung juga turut berperan dalam penanggulangan stunting melalui berbagai kegiatan posyandu di tingkat desa dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan (PMT), akses sanitasi dan air bersih serta edukasi gizi kepada masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat desa.

Pada pelaksanaannya Desa dan Puskesmas melakukan koordinasi dimana Desa berperan dalam pendataan dan pengordinasian sebagai pelaksana sosial – administrasi dan Puskesmas berperan sebagai pelaksana teknis kesehatan yang menyediakan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu. koordinasi ini terlihat dalam kegiatan posyandu yang merupakan media kolaborasi langsung antara desa dan puskesmas. Dalam implementasi kebijakan stunting secara umum Puskesmas Cimenyan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menjalankan program berdasarkan Stranas Stunting dan pedoman nasional Kementerian kesehatan Intervensi Gizi Spesifik yang berkontribusi langsung terhadap penurunan stunting sekitar 30%. dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, kader kesehatan dan masyarakat yang terintegrasi dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk memastikan intervensi gizi spesifik berjalan secara efektif.

Namun demikian, kondisi empiris di Desa Ciburial menunjukkan adanya dinamika permasalahan yang perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan informasi dari pihak Puskesmas, pada pertengahan tahun 2025 Desa Ciburial dilaporkan tidak memiliki kasus stunting yang tercatat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan stunting yang dilaksanakan di desa pada periode sebelumnya dinilai berjalan dengan baik, sekaligus mencerminkan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang relatif baik. Akan tetapi, pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, Puskesmas kembali melaporkan adanya peningkatan kasus stunting yang cukup signifikan di Desa Ciburial dengan terdapat ketidakkonsistenan capaian penurunan stunting di Desa Ciburial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa stunting masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya balita dan keluarga yang berada dalam kondisi rentan dan menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan program yang telah dilaksanakan dengan hasil yang dicapai secara berkelanjutan di lapangan.

Peningkatan jumlah kasus stunting yang relatif signifikan dalam rentang waktu yang singkat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan konsistensi implementasi kebijakan penanggulangan stunting dilaksanakan di Desa Ciburial. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok sasaran secara efektif. Selain itu kondisi ini juga mengindikasikan adanya potensi permasalahan dalam pendataan dan pelaporan untuk memastikan keakuratan data stunting berdasarkan pengukuran antropometri.

Pada konteks Implementasi kebijakan publik, permasalahan tersebut mencerminkan adanya tantangan terdapat indikasi permasalahan dalam aspek implementasi kebijakan, seperti ketepatan sasaran program (khususnya PMT), akurasi data stunting, serta koordinasi antar pelaksana (desa, puskesmas, dan kader posyandu). Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal dan konsisten antar pelaksana kebijakan di tingkat desa. Dalam kerangka kebijakan percepatan penurunan stunting, Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pendataan, pemantauan pertumbuhan balita, serta pelaksanaan intervensi langsung kepada masyarakat. Ketidakakuratan dan keterlambatan data berpotensi menghambat penentuan sasaran program, efektivitas intervensi gizi, serta evaluasi keberhasilan kebijakan penanggulangan stunting secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dilapangan.

Selain permasalahan tersebut, dinamika tersebut juga membuka ruang untuk mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanggulangan stunting di Desa Ciburial, seperti kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, serta komitmen dan peran aktor-aktor pelaksana kebijakan di tingkat desa. Implementasi kebijakan yang tidak berjalan secara optimal berpotensi menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Nugroho menekankan bahwa keberhasilan Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, kesiapan pelaksana,

ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antar lembaga. Nugroho juga mengemukakan prinsip empat tepat sebagai ukuran normatif dalam menilai keberhasilan Implementasi Kebijakan publik yaitu dengan Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Target, dan Tepat Proses.

Sejauh ini, penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting telah banyak dilakukan diberbagai wilayah dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti A, et.al (2025) pada penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan stunting di Desa Kemawi yang berfokus penilaian efektivitas Implementasi kebijakan yang sedang berjalan melalui empat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi berjalan cukup efektif dan relatif baik, namun dalam penelitian ini menemukan kendala pada transmisi informasi teknis yang belum merata, rangkap jabat dalam struktur pelaksana. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ririn Viani, et al., (2025) mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Babakan Kabupaten Banyumas menekankan pada evaluasi kondisi pelaksanaan kebijakan yang menunjukkan hasil implemenasi berjalan cukup baik meskipun terdapat kendala pada sumber daya manusia dan penerimaan sasaran kebijakan.

Namun penelitian – penlitian tersebut umumnya menekankan pada hasil kebijakan. Tapi dalam penelitian ini saya menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan mengkaji Implementasi kebijakan penanggulangan stunting dari sudut

pandang proses Implementasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada bagaimana kebijakan dijalankan dilapangan tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan tersebut dipraktikkan, dan dipersepsikan, agar dapat memengaruhi keberhasilan penanggulangan stunting di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengkaji seluruh program penanggulangan stunting secara luas, tetapi secara spesifik berfokus pada implementasi kebijakan melalui Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) dan proses implementasinya di tingkat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan stunting di Desa Ciburial tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan semata, tetapi juga berkaitan dengan proses implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung**” menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana kebijakan penanggulangan stunting diimplementasikan di Desa Ciburial, mengidentifikasi faktor - faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan stunting yang menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan berkelanjutan dan pelaksanaannya di masa yang akan datang.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan dalam penanggulangan stunting di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan tersebut diimplementasikan diantaranya melalui Program Pemberian Makan Tambahan (PMT) yang berfokus pada balita yang terindikasi stunting serta faktor yang mempengaruhi terhadap penanggulangan stunting di Desa Ciburial.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting melalui Program PMT di Desa Ciburial dilaksanakan?
2. Apa saja Faktor - faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Ciburial?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Ciburial

2. Untuk menganalisis faktor - faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Desa Ciburial

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengayaan literatur , menambah pemahaman teoritis untuk perbandingan antara teori dan praktik yang telah diterapkan, serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya kajian Implementasi Kebijakan Publik mengenai Penanggulangan Stunting.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi serta informasi yang digunakan oleh pihak - pihak terkait dalam memperbaiki pelaksanaan Penanggulangan Stunting. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi akademis mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting